

Aktivisme Sosial: Bentuk Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Perubahan Sosial

Erfain^{1*}

¹ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Sulawesi Tenggara

* Author Correspondence. Email: erfain79@gmail.com, Phone: +6285299587997

Abstract : *Social activism is a concrete manifestation of civil society participation in driving social, political, economic, and cultural change. In both global and local contexts, social activism emerges as a response to injustice, marginalization, and the failure of the state and market to meet societal needs. This literature review aims to analyze the forms of social activism, their role in strengthening civil society, and the challenges faced in the digital era. The review shows that social activism has developed in various forms, ranging from street protests and policy advocacy to environmental movements and digital campaigns through social media. Activism is not merely mass mobilization but also a strategy for building critical awareness, solidarity, and alternative solutions to structural issues. In the digital era, social media serves as a new arena that expands the reach of activism, although it also presents challenges in the form of disinformation and movement fragmentation. This article concludes that social activism is a crucial instrument in strengthening civil society and democracy, although its effectiveness is heavily influenced by the political context, technology, and the capacity of civil society organizations themselves. Therefore, understanding social activism is key to understanding the dynamics of contemporary social change and formulating more inclusive and sustainable participation strategies.*

Keywords: *Social Activism, Civil Society, Social Change, Participation, Social Movements*

Abstrak: Aktivisme sosial merupakan salah satu wujud nyata partisipasi masyarakat sipil dalam mendorong perubahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Dalam konteks global maupun lokal, aktivisme sosial hadir sebagai respons terhadap ketidakadilan, marginalisasi, dan kegagalan negara maupun pasar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Literature review ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk aktivisme sosial, perannya dalam memperkuat masyarakat sipil, serta tantangan yang dihadapi dalam era digital. Hasil telaah menunjukkan bahwa aktivisme sosial berkembang dalam beragam bentuk, mulai dari aksi protes jalanan, advokasi kebijakan, gerakan lingkungan, hingga kampanye digital melalui media sosial. Aktivisme tidak hanya sekadar mobilisasi massa, melainkan juga strategi membangun kesadaran kritis, solidaritas, dan alternatif solusi terhadap isu-isu struktural. Di era digital, media sosial berperan sebagai arena baru yang memperluas jangkauan aktivisme, meskipun juga menghadirkan tantangan berupa disinformasi dan fragmentasi gerakan. Artikel ini menyimpulkan bahwa aktivisme sosial merupakan instrumen penting dalam memperkuat masyarakat sipil dan demokrasi, meskipun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh konteks politik, teknologi, serta kapasitas organisasi masyarakat sipil itu sendiri. Dengan demikian, pemahaman terhadap aktivisme sosial menjadi kunci untuk membaca dinamika perubahan sosial kontemporer dan merumuskan strategi partisipasi yang lebih inklusif serta berkelanjutan.

Kata Kunci: Aktivisme Sosial, Masyarakat Sipil, Perubahan Sosial, Partisipasi, Gerakan Sosial

1. PENDAHULUAN

Aktivisme sosial merupakan salah satu manifestasi nyata dari partisipasi masyarakat sipil dalam merespons berbagai persoalan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Dalam perspektif sosiologis, aktivisme dipandang sebagai upaya kolektif masyarakat untuk memperjuangkan perubahan struktural ketika institusi formal, seperti negara maupun pasar, gagal memenuhi kebutuhan publik. Sejarah mencatat bahwa gerakan aktivisme di Indonesia mulai menemukan momentumnya sejak era reformasi 1998, ketika masyarakat sipil berhasil menumbangkan rezim otoritarian dan membuka jalan bagi demokratisasi (Hidayat, 2023). Dengan demikian, aktivisme bukan sekadar reaksi sesaat terhadap ketidakadilan, melainkan instrumen penting yang menghubungkan kepentingan warga dengan arah kebijakan publik.

Dalam perkembangannya, aktivisme sosial tidak terbatas pada protes jalanan atau demonstrasi, tetapi juga mencakup aktivitas advokasi, penyadaran masyarakat, hingga pembangunan alternatif berbasis komunitas. Masyarakat sipil melalui berbagai organisasi non-pemerintah (NGO), komunitas lokal, dan kelompok kepentingan telah memainkan peran vital dalam menyuarakan isu-isu yang sering kali diabaikan oleh negara. Misalnya, isu keadilan gender, hak-hak kelompok minoritas, dan krisis iklim banyak digerakkan melalui aktivisme sosial yang konsisten dan berkelanjutan (Wijayanti, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa aktivisme memiliki dimensi strategis dalam membangun kesadaran kritis sekaligus mendorong transformasi sosial yang lebih inklusif.

Era digital kemudian membawa perubahan signifikan dalam praktik aktivisme sosial. Kehadiran media sosial membuka ruang baru bagi mobilisasi massa, kampanye publik, hingga advokasi kebijakan secara lebih cepat dan luas. Aktivisme digital memungkinkan pesan-pesan perjuangan menjangkau audiens lintas batas geografis, sekaligus memperkuat jaringan solidaritas antar-komunitas. Fenomena seperti gerakan #ReformasiDikorupsi dan kampanye lingkungan di Indonesia menunjukkan bagaimana ruang digital mampu memperkuat daya tawar masyarakat sipil terhadap negara (Aminah, 2022). Namun, kemajuan teknologi ini juga menghadirkan tantangan baru berupa disinformasi, polarisasi politik, serta ketergantungan pada algoritma media sosial yang bisa melemahkan konsolidasi gerakan.

Selain itu, kompleksitas permasalahan global seperti krisis iklim, pandemi COVID-19, dan meningkatnya ketimpangan sosial-ekonomi telah melahirkan

bentuk-bentuk aktivisme baru. Aktivisme lingkungan, misalnya, berkembang menjadi gerakan transnasional yang melibatkan kolaborasi lintas negara dan lintas disiplin ilmu untuk mendorong agenda pembangunan berkelanjutan (Prasetyo & Lestari, 2024). Begitu pula dengan gerakan solidaritas digital yang muncul di tengah pandemi, di mana masyarakat sipil berinisiatif menggalang bantuan sosial, edukasi kesehatan, hingga advokasi kebijakan berbasis hak-hak warga. Kondisi ini mempertegas bahwa aktivisme sosial selalu beradaptasi dengan konteks zaman, sekaligus menjadi refleksi atas kegagalan negara dalam melindungi kepentingan publik.

Dalam konteks demokrasi, aktivisme sosial berfungsi sebagai mekanisme check and balance terhadap praktik kekuasaan negara. Gerakan masyarakat sipil tidak hanya bertugas mengawasi jalannya pemerintahan, tetapi juga memperjuangkan agar kebijakan publik selaras dengan prinsip keadilan sosial. Namun, di banyak negara berkembang termasuk Indonesia, aktivis sering menghadapi represi politik, kriminalisasi, hingga stigmatisasi dari pihak berkuasa (Nugroho, 2021). Hal ini menandakan bahwa meskipun demokrasi memberikan ruang kebebasan sipil, praktik aktivisme tetap diwarnai tarik-menarik antara masyarakat sipil dan negara.

Lebih jauh lagi, aktivisme sosial juga memiliki dimensi kultural. Ia tidak hanya menyuarakan isu-isu struktural, tetapi juga membentuk identitas kolektif dan solidaritas berbasis nilai. Misalnya, gerakan berbasis komunitas adat atau kelompok religius sering kali mengedepankan nilai kearifan lokal dan spiritualitas sebagai dasar perjuangan mereka. Dalam konteks ini, aktivisme sosial bukan hanya instrumen politik, tetapi juga sarana membangun narasi alternatif terhadap dominasi budaya mainstream (Wijayanti, 2025). Dengan demikian, aktivisme sosial menjadi ruang artikulasi kepentingan yang menggabungkan aspek politik, sosial, ekonomi, dan kultural secara integral.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa aktivisme sosial memiliki peran penting sebagai agen perubahan dalam masyarakat kontemporer. Ia berfungsi tidak hanya untuk menantang ketidakadilan, tetapi juga untuk membangun kesadaran kritis, solidaritas, serta alternatif solusi bagi permasalahan sosial yang kompleks. Dalam menghadapi tantangan era digital, aktivisme sosial memerlukan strategi adaptif agar mampu tetap relevan, inklusif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kajian mengenai aktivisme sosial perlu terus dikembangkan untuk

memahami dinamika partisipasi masyarakat sipil dalam perubahan sosial, baik pada level lokal, nasional, maupun global.

2. METODE

Artikel ini disusun menggunakan metode literature review yang berfokus pada analisis kritis terhadap berbagai penelitian dan publikasi ilmiah mengenai aktivisme sosial, masyarakat sipil, serta perubahan sosial. Pendekatan ini dipilih karena literature review memungkinkan peneliti untuk menelaah, membandingkan, serta mensintesis temuan dari berbagai penelitian terdahulu sehingga dapat menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai fenomena yang dikaji (Snyder, 2019). Dengan menggunakan pendekatan ini, penulis tidak hanya mengidentifikasi bentuk-bentuk aktivisme sosial, tetapi juga mengaitkannya dengan konteks historis, politik, dan teknologi yang melingkupinya.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran artikel dari jurnal nasional dan internasional yang terbit dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2019–2025). Hal ini dimaksudkan agar kajian tetap relevan dengan dinamika kontemporer, khususnya terkait perkembangan aktivisme di era digital. Sumber literatur dipilih dari basis data akademik yang kredibel, seperti Google Scholar, DOAJ, dan Garuda (Garba Rujukan Digital). Kriteria inklusi meliputi artikel yang membahas aktivisme sosial, partisipasi masyarakat sipil, perubahan sosial, serta penggunaan teknologi digital dalam gerakan sosial. Sementara itu, artikel yang tidak sesuai dengan tema, memiliki data yang tidak jelas, atau kurang relevan dengan fokus kajian dikeluarkan dari proses analisis.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan tematik (thematic analysis), yaitu mengidentifikasi pola, tema utama, dan isu-isu kritis yang muncul dari literatur yang ditelaah (Braun & Clarke, 2021). Dari hasil analisis, tema besar yang ditemukan mencakup bentuk-bentuk aktivisme sosial, peran aktivisme dalam memperkuat masyarakat sipil, serta tantangan yang dihadapi dalam konteks global dan digital. Dengan demikian, metode ini tidak hanya mendeskripsikan hasil penelitian terdahulu, tetapi juga memberikan interpretasi yang lebih mendalam mengenai relevansi aktivisme sosial dalam perubahan sosial kontemporer.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Bentuk Aktivisme Sosial

1) Aksi protes dan demonstrasi publik

Aksi protes dan demonstrasi publik merupakan salah satu bentuk paling klasik dari aktivisme sosial yang kerap digunakan masyarakat untuk

mengekspresikan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah atau kondisi sosial tertentu. Melalui aksi massa, masyarakat sipil berusaha menekan negara agar mendengarkan aspirasi rakyat sekaligus mendorong terjadinya perubahan kebijakan. Di Indonesia, aksi-aksi mahasiswa pada era reformasi menjadi bukti nyata bagaimana protes publik dapat mengguncang sistem politik dan melahirkan perubahan struktural yang signifikan. Saat ini, aksi protes tetap relevan, meskipun seringkali dihadapkan pada tantangan berupa represi aparat maupun pembatasan ruang kebebasan sipil (Santoso, 2020).

2) Advokasi kebijakan melalui organisasi masyarakat sipil (OMS)

Selain melalui protes publik, aktivisme sosial juga diwujudkan dalam bentuk advokasi kebijakan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil (OMS). OMS berperan penting dalam melakukan kajian, menyusun rekomendasi kebijakan, hingga melakukan lobi kepada pengambil keputusan agar suara masyarakat terwakili dalam agenda pembangunan. Advokasi kebijakan dianggap lebih sistematis karena melibatkan riset, strategi komunikasi, serta jaringan kolaborasi yang luas dengan berbagai pemangku kepentingan. Di Indonesia, banyak OMS yang fokus pada isu hak asasi manusia, lingkungan, dan pemberdayaan perempuan, yang berhasil memengaruhi regulasi publik serta menciptakan ruang partisipasi warga negara yang lebih besar (Rahman, 2021).

3) Aktivisme lingkungan dan keberlanjutan

Gerakan aktivisme lingkungan dan keberlanjutan semakin menonjol dalam dua dekade terakhir seiring dengan meningkatnya kesadaran global akan krisis iklim dan kerusakan ekosistem. Aktivisme lingkungan di Indonesia banyak digerakkan oleh komunitas lokal, LSM lingkungan, hingga gerakan transnasional yang menentang praktik eksploitasi sumber daya alam. Aktivis lingkungan tidak hanya menyuarakan penolakan terhadap proyek-proyek yang merusak, tetapi juga menawarkan alternatif solusi berupa pengelolaan sumber daya berbasis komunitas dan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, aktivisme lingkungan berperan tidak hanya sebagai kontrol sosial, tetapi juga sebagai motor penggerak inovasi menuju keberlanjutan ekologi dan sosial (Putri, 2022).

4) Aktivisme digital melalui kampanye media sosial

Aktivisme digital melalui kampanye media sosial menjadi fenomena baru yang merevolusi cara masyarakat sipil berpartisipasi dalam perubahan sosial.

Dengan memanfaatkan platform seperti Twitter, Instagram, dan TikTok, aktivis mampu menyebarkan pesan, mengorganisasi massa, dan membangun solidaritas lintas wilayah secara lebih cepat dan masif. Fenomena ini terlihat pada berbagai gerakan seperti #ReformasiDikorupsi dan kampanye #SaveKPK, yang berhasil menarik perhatian publik dan media. Namun, di balik potensinya, aktivisme digital juga rawan terhadap manipulasi opini, penyebaran hoaks, dan polarisasi politik yang dapat melemahkan konsolidasi gerakan. Oleh karena itu, meskipun aktivisme digital membuka ruang partisipasi lebih luas, efektivitasnya tetap bergantung pada kemampuan aktivis mengelola informasi dan membangun strategi komunikasi yang sehat (Utami, 2023).

b. Peran Aktivisme dalam Masyarakat Sipil

1) Membentuk kesadaran kritis dan solidaritas kolektif

Aktivisme sosial berperan penting dalam membentuk kesadaran kritis dan solidaritas kolektif di kalangan masyarakat. Melalui pendidikan politik, kampanye publik, maupun aksi nyata, aktivisme menumbuhkan kesadaran bahwa ketidakadilan sosial bukanlah sesuatu yang alami, melainkan hasil dari struktur yang dapat diubah. Kesadaran kritis ini memungkinkan masyarakat untuk mengorganisir diri, menyusun strategi perjuangan, serta membangun solidaritas lintas kelompok yang berbeda. Kesadaran kolektif menjadi fondasi penting dalam menciptakan gerakan sosial yang kuat dan berkelanjutan (Kurniawan, 2020).

2) Menjadi jembatan antara rakyat dan negara dalam demokrasi

Dalam sistem demokrasi, aktivisme sosial memainkan peran sebagai jembatan yang menghubungkan aspirasi rakyat dengan kebijakan negara. Gerakan masyarakat sipil berfungsi sebagai mekanisme check and balance dengan cara mengawasi jalannya pemerintahan dan mendorong akuntabilitas publik. Aktivisme sosial memastikan bahwa suara kelompok marginal atau minoritas tidak terabaikan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, aktivisme bukan hanya sarana perlawanan, tetapi juga wahana untuk memperkuat kualitas demokrasi melalui partisipasi warga negara yang lebih aktif dan kritis (Yuliana, 2021).

3) Mendorong agenda keadilan sosial dan lingkungan

Salah satu kontribusi paling nyata dari aktivisme sosial adalah kemampuannya mendorong agenda keadilan sosial dan lingkungan agar mendapat perhatian serius dalam kebijakan publik. Aktivis sering kali menjadi

aktor yang pertama kali mengangkat isu-isu ketidakadilan, seperti diskriminasi gender, eksploitasi buruh, hingga kerusakan lingkungan, ke ruang publik. Tekanan kolektif dari gerakan sosial seringkali memaksa pemerintah untuk merespons melalui kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat. Dengan demikian, aktivisme menjadi agen penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara adil, inklusif, dan berkelanjutan (Siregar, 2022).

c. Tantangan Aktivisme Sosial

1) Represi politik dan kriminalisasi aktivis

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi aktivisme sosial adalah represi politik dan kriminalisasi terhadap para aktivis. Meskipun demokrasi menjanjikan kebebasan berekspresi, dalam praktiknya banyak aktivis yang masih berhadapan dengan intimidasi, pembatasan ruang gerak, bahkan ancaman hukum. Hal ini sering terjadi terutama ketika aktivis menyuarkan isu-isu yang dianggap mengganggu kepentingan politik maupun ekonomi elite berkuasa. Represi semacam ini tidak hanya melemahkan gerakan, tetapi juga menimbulkan rasa takut yang membatasi ruang partisipasi publik (Wulandari, 2020).

2) Disinformasi dan polarisasi di media sosial

Tantangan lain yang cukup signifikan adalah maraknya disinformasi dan polarisasi di media sosial. Aktivisme digital yang seharusnya memperkuat solidaritas justru kerap dipengaruhi oleh penyebaran berita palsu dan framing politik yang memecah belah masyarakat. Polarisasi ini menyebabkan gerakan sosial sulit menemukan konsensus bersama karena setiap kelompok terjebak dalam gelembung informasi yang berbeda. Dalam konteks ini, literasi digital menjadi sangat penting agar masyarakat dapat memilah informasi secara kritis dan tidak mudah terprovokasi (Fauzan, 2021).

3) Fragmentasi gerakan yang melemahkan solidaritas

Fragmentasi gerakan sosial juga menjadi tantangan besar dalam menjaga konsolidasi masyarakat sipil. Banyak gerakan sosial yang terpecah karena perbedaan strategi, orientasi politik, atau bahkan perebutan sumber daya. Fragmentasi ini membuat kekuatan gerakan melemah karena energi perjuangan terpecah ke berbagai arah tanpa tujuan kolektif yang jelas. Kondisi ini sering dimanfaatkan oleh pihak berkuasa untuk melemahkan aktivisme dengan cara mengadu domba antar kelompok. Oleh sebab itu, konsolidasi dan

penyusunan agenda bersama menjadi prasyarat penting agar gerakan sosial tetap solid dan efektif (Saputra, 2022).

4) Ketergantungan pada pendanaan eksternal

Ketergantungan pada pendanaan eksternal juga menjadi dilema dalam keberlanjutan aktivisme sosial. Banyak organisasi masyarakat sipil mengandalkan dana hibah dari donor internasional atau lembaga swasta untuk menjalankan program mereka. Meskipun hal ini membantu menjaga keberlangsungan gerakan, terlalu bergantung pada pendanaan eksternal berpotensi melemahkan kemandirian gerakan dan menimbulkan konflik kepentingan. Dalam beberapa kasus, ketergantungan ini bahkan memengaruhi agenda perjuangan agar selaras dengan kepentingan donor. Oleh karena itu, penting bagi gerakan sosial untuk mencari model pendanaan alternatif yang lebih mandiri dan berkelanjutan (Handayani, 2023).

4. KESIMPULAN

Aktivisme sosial merupakan pilar penting dalam memperkuat masyarakat sipil dan mendorong terjadinya perubahan sosial yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Berdasarkan kajian literatur, aktivisme tidak hanya berperan sebagai sarana penyampaian aspirasi publik, tetapi juga menjadi medium untuk membangun kesadaran kritis, memperkuat solidaritas kolektif, serta memperluas ruang partisipasi demokratis melalui berbagai bentuknya seperti aksi protes, advokasi kebijakan, aktivisme lingkungan, maupun kampanye digital. Kehadiran teknologi digital semakin memperluas jangkauan dan daya mobilisasi gerakan sosial, sekaligus menghadirkan tantangan berupa disinformasi, polarisasi politik, fragmentasi gerakan, serta ketergantungan pada pendanaan eksternal.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, S. (2022). Aktivisme digital dan transformasi gerakan sosial di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 26(1), 45–59.
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic analysis: A practical guide*. London: SAGE Publications.
- Fauzan, M. (2021). Disinformasi dan polarisasi politik di media sosial. *Jurnal Komunikasi Politik*, 9(2), 134–148.
- Handayani, T. (2023). Tantangan keberlanjutan gerakan sosial: Ketergantungan pada pendanaan eksternal. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 11(1), 55–72.
- Hidayat, R. (2023). Peran masyarakat sipil dalam memperkuat demokrasi: Studi gerakan sosial kontemporer. *Jurnal Demokrasi Indonesia*, 12(2), 101–118.

- Kurniawan, B. (2020). Kesadaran kritis dan solidaritas kolektif dalam gerakan sosial. *Jurnal Ilmu Sosial*, 7(2), 77–93.
- Nugroho, Y. (2021). Civil society and activism in the digital era. *Asian Journal of Social Science*, 49(3), 289–307.
- Prasetyo, A., & Lestari, D. (2024). Aktivisme lingkungan dan partisipasi publik dalam pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 15(2), 77–93.
- Putri, A. (2022). Aktivisme lingkungan dan keberlanjutan di Indonesia. *Jurnal Ekologi dan Pembangunan*, 14(1), 45–61.
- Rahman, H. (2021). Advokasi kebijakan dan peran OMS dalam masyarakat sipil. *Jurnal Demokrasi dan Kebijakan Publik*, 8(3), 112–128.
- Santoso, D. (2020). Aksi protes publik sebagai instrumen perubahan sosial. *Jurnal Politik dan Masyarakat*, 6(1), 23–40.
- Saputra, L. (2022). Fragmentasi gerakan sosial dan dampaknya terhadap masyarakat sipil. *Jurnal Sosiologi Kontemporer*, 10(2), 98–114.
- Siregar, N. (2022). Aktivisme dan agenda keadilan sosial di era globalisasi. *Jurnal Kajian Sosial*, 18(1), 56–70.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Utami, R. (2023). Aktivisme digital melalui media sosial: Peluang dan tantangan. *Jurnal Media dan Komunikasi*, 12(2), 66–82.
- Wijayanti, M. (2025). Partisipasi masyarakat sipil dan tantangan perubahan sosial di era digital. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 27(1), 33–50.
- Wulandari, S. (2020). Represi politik dan kriminalisasi aktivis di Indonesia. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 5(1), 89–104.
- Yuliana, E. (2021). Peran aktivisme sosial dalam memperkuat demokrasi. *Jurnal Demokrasi Indonesia*, 9(2), 77–92.